

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Ekonomi syariah dalam beberapa tahun belakangan ini mengalami perkembangan yang signifikan terutama di bidang perbankan. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menjadi tolak ukur eksistensi dari keberhasilan ekonomi syariah di Indonesia. Dewasa ini perkembangan bank syariah di Indonesia meningkat secara pesat hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat terutama masyarakat muslim yang semakin mengetahui betapa pentingnya menggunakan jasa bank syariah. Adapun macam-macam perbankan syariah berdasarkan OJK meliputi BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit usaha Syariah) serta BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). Seiring dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang pesat di Indonesia membuat aktivitas ekonomi masyarakat semakin meningkat, hal ini berdampak pula pada pertumbuhan lembaga keuangan yang meningkat. Sehingga dalam perkembangan bank syariah ini bukan hanya merambah bank umum syariah saja namun juga merambah BPRS yang ditunjukkan dengan banyaknya bermunculan berbagai Bank Pembiayaan Rakyat syariah (BPRS) di Indonesia sehingga BPRS dapat dijumpai diberbagai daerah.

Berdasarkan UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan dan peraturan pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Pada pasal 1 UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7

tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Peraturan Bank Indonesia kegiatan usaha BPRS yaitu meliputi menghimpun dana masyarakat, memberikan pembiayaan, menempatkan dana berdasarkan prinsip syariah, menetapkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka dan tabungan sesuai dengan prinsip syariah. Perbedaan yang mendasar antara bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) dan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) terletak pada prinsip yang tertuang dalam pengoperasiannya, dimana pada BPR konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan pada BPRS menggunakan sistem bagi hasil. Pada sistem bagi hasil yang dipakai BPRS membuat kinerja BPRS akan menjadi transparan kepada nasabah sehingga nasabah dapat memonitoring bank syariah atas bagi hasil yang diperoleh (Pratiwi,2012). Dikutip dari outlook perbankan syariah tahun 2013 dan 2012, pada dasarnya BPRS lebih mengutamakan untuk memberikan pembiayaan untuk sektor usaha kecil, usaha mikro serta usaha menengah. Mayoritas kantor-kantor BPRS beroperasi di wilayah-wilayah pedesaan/kabupaten dimana pada wilayah tersebut masih banyak masyarakat yang membutuhkan pembiayaan. Sehingga dapat di katakan bahwa pelayanan dari BPRS lebih memiliki jangkauan lebih luas kepada masyarakat.

Pada awal terbentuknya, BPRS diarahkan untuk menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan serta mengatasi adanya praktek lintah darat yang marak terjadi di masyarakat pedesaan khususnya para petani, pegawai dan buruh. Namun dengan semakin berkembangnya kebutuhan dan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat fungsi BPRS tidak hanya ditujukan bagi masyarakat pedesaan tetapi juga mencakup pemberian jasa perbankan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah di perkotaan.

BPRS memiliki pengaruh terhadap meningkatnya UMKM di masyarakat, karena pada dasarnya sasaran utama penyaluran pembiayaan BPRS adalah usaha mikro kecil menengah. Menurut Yuliarmi dan Yoga yang di rangkum oleh Rivalah dan Maulidiyah bahwa kehadiran dari BPR lewat kredit bagi masyarakat menengah kebawah yang mayoritas berorientasi sebagai pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) menjadi sangat penting, karena sebagian besar pelaku usaha di Indonesia merupakan pelaku UMKM. BPRS menawarkan jalan keluar untuk mengatasi masalah permodalan kepada pelaku usaha informal untuk mengembangkan usahanya, sehingga membuat BPR dan BPRS sangat berguna bagi pengembangan UMKM di Indonesia.

Adanya BPRS di Indonesia sangatlah mendukung dalam menunjang permodalan di berbagai sektor perekonomian. Peran BPRS dalam hal ini adalah membantu permodalan dalam bentuk pembiayaan atau jasa lain yang sesuai dengan prinsip syariah guna menunjang operasional dari usaha serta

berbagai sektor tersebut. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah juga menjadi alternatif pilihan bagi para debitur baik para pelaku usaha mikro maupun menengah dalam solusi permodalan usaha mereka karena prosedur pembiayaan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah relatif masih sederhana dan juga sesuai dengan prinsip syariah.

Tabel 1.1

Perkembangan komposisi pembiayaan yang diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tahun 2011-2016
(*Financing Composition of Sharia Rural Bank*)

Akad	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Akad Mudharabah	78.807	99.361	106.851	122.467	168.516	178.424
Akad Musyarakah	246.796	321.131	426.528	567.658	652.316	762.266
Akad Murabahah	2.154.494	2.854.646	3.546.361	3.965.543	4.491.697	4.881.059
Akad Salam	20	197	26	16	15	14
Akad Istishna	23.673	20.751	17.614	12.881	11.135	9.286
Akad Ijarah	13.815	13.522	8.318	5.179	6.175	7.361
Akad Qardh	72.095	81.666	93.325	97.709	123.588	139.768
Multijasa	89.230	81.666	93.325	97.709	123.588	139.768

Sumber :Laporan publikasi statistik perbankan syariah oleh OJK

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, maka terlihat bahwa perkembangan penyaluran pembiayaan Bank pembiayaan rakyat syariah kepada masyarakat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Ini membuktikan bahwa minat masyarakat dalam menggunakan jasa bank pembiayaan rakyat syariah terus meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 1.2

Perkembangan Jumlah Bank pembiayaan Rakyat Syariah Berdasarkan total Aset
(*Number of Sharia Rural Bank based on Total Assets*)

Total Aset	2011	2012	2013	2014	2015	2016
< 1 Miliar	3	6	4	1	1	2
1 s.d 5 Miliar	24	17	19	11	8	5
> 5 s.d 10 Miliar	39	36	30	34	27	23
> 10 Miliar	89	99	110	117	125	132
Total Aset	155	158	163	163	163	168

Sumber :Laporan publikasi statistik perbankan syariah oleh OJK

Berdasarkan tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa secara konsisten jumlah bank berdasarkan aset pada tahun 2011 sampai dengan 2016 mengalami kenaikan. Walaupun pada tahun 2011 sampai dengan 2016 jumlah BPRS mengalami penurunan pada kategori total aset < 1 miliar sampai dengan >5 s.d 10 Miliar, hal ini disebabkan oleh adanya beberapa BPRS di daerah yang harus dicabut izinnya oleh OJK karena dinilai tidak sehat. Sedangkan pada tahun yang sama dengan kategori > 10 miliar mengalami kenaikan yang sangat signifikan, dan total perkembangan dari jumlah kantor berdasarkan total aset terus meningkat pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh berdirinya BPRS baru yang memiliki total aset diatas 10 miliar.

Melihat begitu tingginya minat masyarakat dalam menggunakan jasa BPRS sebagai lembaga intermediasi, serta pentingnya BPRS didalam menunjang perekonomian masyarakat yang nantinya mempengaruhi perkembangan perekonomian maka sangat perlu dilakukan penilaian atas kinerja bank tersebut. Menurut Rahma (2010) kinerja bank dapat didefinisikan sebagai gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu yang mencakup beberapa aspek yaitu meliputi aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Kinerja

bank merupakan hal yang sangat penting, karena industri perbankan adalah industri yang sangat dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat, maka dari itu bank harus menunjukkan kredibilitasnya, salah satu caranya dengan melalui peningkatan profitabilitas, sehingga akan semakin banyak masyarakat yang bertransaksi di bank tersebut. BPRS sebagai bank yang berlandaskan prinsip syariah sangat penting untuk terus meningkatkan profitabilitasnya karena tingkat laba bank syariah bukan hanya berpengaruh terhadap bagi hasil bagi pemegang saham tetapi juga berpengaruh juga terhadap hasil yang dapat diberikan kepada nasabah (Pratiwi,2012).

Alasan peneliti melakukan penelitian terhadap profitabilitas perbankan adalah dengan mengetahui profitabilitas, maka bank dapat menganalisis tingkat efisiensi BPRS dalam memperoleh laba selama periode tertentu dengan modal yang digunakan. Melihat bahwa BPRS adalah salah satu lembaga keuangan yang banyak digunakan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonominya serta BPRS juga salah satu media yang dapat mendorong pembangunan masyarakat ekonomi lemah di Indonesia, maka dari itu penelitian profitabilitas BPRS sangatlah penting. Penilaian kesehatan bank yang dilakukan bank Indonesia juga dilihat dari sisi profitabilitasnya dilakukan dengan menggunakan indikator ROA.

Kinerja keuangan suatu bank juga mencerminkan tingkat kesehatan bank tersebut. Dalam Surat Edaran BI No. 9/24/DPbs disebutkan penilaian tingkat kesehatan bank dipengaruhi oleh faktor CAMELS (*Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity, Sensitivity to Market Risk*). Aspek *Capital* meliputi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) atau *Capital*

Adequacy Ratio (CAR), aspek *Asset Quality* meliputi *Non Performing Financing (NPF)*, aspek *Earnings* meliputi *Return On Equity*, faktor permodalan bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung resiko. Untuk saat ini minimal CAR sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR), atau ditambah dengan Resiko Pasar dan Resiko Operasional, hal ini tergantung pada kondisi bank yang bersangkutan (Riyadi, 2006). Besarnya modal suatu bank akan berpengaruh pada mampu atau tidaknya suatu bank secara efisien menjalankan kegiatannya. Jika modal yang dimiliki oleh bank tersebut mampu menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindarkan, maka bank dapat mengelola seluruh kegiatannya secara efisien, sehingga kekayaan bank (kekayaan pemegang saham) diharapkan akan semakin meningkat demikian juga sebaliknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara CAR dengan ROA adalah positif.

Operational Efficiency Ratio atau BOPO merupakan perbandingan antara total biaya operasi dengan total pendapatan operasi. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya (Dendawijaya, 2003). Semakin tinggi rasio BOPO, kinerja bank akan semakin menurun. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut. Dengan demikian besar kecilnya BOPO akan mempengaruhi profitabilitas bank (ROA).

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko kredit. *Non Performing Financing* adalah perbandingan antara total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang di berikan

dan kepada debitur. Rasio *Non Performing Financing* analog dengan *Non Performing Loan* pada bank konvensional. Karena pada bank syariah tidak mengenal adanya pinjaman namun menggunakan istilah pembiayaan. NPL mencerminkan risikokredit, semakin kecil NPL semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank (Dendrawijaya, 2009). Namun sebaliknya, jika risiko kredit yang ditanggung bank semakin tinggi, profitabilitas akan menurun. Sehingga dikatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap ROA.

Pada penelitian ini profitabilitas diwakili oleh variabel ROA (*Return of Assets*), dengan meneliti tentang pengaruh tingkat *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Finance* (NPF), dan *Operational Efficiency Ratio* (OER), serta inflasi mewakili variabel makro sebagai variabel independennya. Dipilihnya variabel-variabel independent tersebut karena variabel-variabel independent tersebut adalah rasio-rasio keuangan perbankan yang terkait langsung oleh profitabilitas dan mencerminkan dari kinerja BPRS itu sendiri.

Dari latar belakang tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Analisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Finance* (NPF), *Operational Efficiency Ratio* (OER) dan inflasi terhadap *Return Of Asset* (ROA) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia periode Januari 2013- Agustus 2016”.

1.2. Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka untuk lebih memfokuskan penelitian pada inti permasalahan, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisa pengaruh variabel-variabel yang telah ditentukan yaitu CAR, dan NPF, OER, dan inflasi terhadap profitabilitas BPRS, dalam hal ini profitabilitas dilihat dari segi ROA.
2. Penelitian ini hanya dilakukan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang ada di Indonesia.
3. Penelitian ini hanya dilakukan pada periode Januari 2013 sampai dengan Agustus 2016.

1.3. Rumusan Masalah Penelitian

Dengan munculnya bank syariah di Indonesia tentu ini menjawab kebutuhan masyarakat terutama masyarakat muslim yang meyakini bahwa hukum bunga menurut syariat Islam adalah haram. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh CAR terhadap profitabilitas pada bank pembiayaan rakyat syariah Periode Januari 2013 – Agustus 2016.
2. Seberapa besar pengaruh NPF terhadap profitabilitas pada Bank pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia periode Bulan Januari 2013-Agustus 2016.
3. Seberapa besar pengaruh BOPO terhadap profitabilitas Bank pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia pada bulan Januari 2013-Agustus 2016.
4. Seberapa besar pengaruh inflasi terhadap profitabilitas Bank pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia pada bulan Januari 2013-Agustus 2016.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah ;

1. Untuk Mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *return on asset* (ROA) Bank pembiayaan rakyat syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Non performing Finance* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank pembiayaan rakyat syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Operational Efficiency Ratio* (OER) terhadap *Return on Asset* (ROA) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
4. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi terhadap *Return on Asset* (ROA) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diberbagai aspek, diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang dunia perbankan bagi penulis dan juga bagi pembaca.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusinya sebagai referensi maupun wawasan keilmuwan yang dapat mendukung kegiatan akademisi.
3. Penelitian ini diharapkan dapat membantu bank syariah terutama bank pembiayaan rakyat syariah agar lebih memahami mengenai faktor yang mempengaruhi profitabilitas/*Return on asset* (ROA) BPRS sehingga mampu bersaing dengan bank umum maupun BPR konvensional.